



Judul : KINERJA PARLEMEN DPR: Masih Sibuk Urusan Internal
Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KINERJA PARLEMEN

DPR Masih Sibuk Urusan Internal

JAKARTA, KOMPAS — Hampir sebulan setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat masih berkutat dengan urusan internal lembaganya. Selain menyusun jadwal rapat dan hari libur, para wakil rakyat juga mulai merancang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur urusan internal MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DPR menyelesaikan susunan pimpinan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) pada Rabu (23/10/2024). Sejumlah komisi juga sudah mulai menggelar rapat. Namun, rapat-rapat digelar baru sebatas untuk membahas jadwal komisi.

Salah satu AKD yang menggelar rapat adalah Komisi XIII yang diketuai Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem. Setelah selesai mengesahkan pimpinan, Komisi XIII menggelar rapat untuk membahas jadwal dan mitra kerja yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal maraton memanggil sejumlah mitra kerjanya, seperti Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. Komisinya ingin mengetahui tugas dan wewenang mereka mengingat ada perombakan wewenang dan pemecahan kementerian di pemerintahan baru.

"Apa yang menjadi domain kementerian dan lembaga tersebut akan kami cermati biar masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain," ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu siang.

Hal serupa dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Mereka langsung mengadakan rapat perdana untuk memastikan jadwal kegiatan Baleg DPR sampai 5 Desember 2024. Ini termasuk jadwal rapat dengar pendapat umum, pembentukan panitia kerja, dan hal lainnya.

Revisi UU MD3

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan, pihaknya sudah mengatur jadwal untuk membahas aturan yang bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang bakal dibahas pertengahan November.

Selain itu, Baleg juga mulai merancang pembahasan UU MD3 agar masuk dalam Prolegnas jangka panjang tahun 2024-2029. Aturan tersebut memuat berbagai mekanisme



RUU Perampasan Aset belum masuk Prolegnas.

Bob Hasan

2024-2029 tak lagi seperti 2019, yakni partai pemenang pemilihan calon anggota DPR berhak menguasai kursi ketua DPR.

Revisi UU MD3 kerap menimbulkan polemik di internal DPR. Salah satu dampaknya adalah gagalnya PDI-P mendapat kursi ketua DPR pada 2014 karena sistem penentuan pimpinan DPR diubah menjadi lewat pemilihan.

Meskipun demikian, Bob Hasan menjelaskan, masuknya RUU MD3 dalam Prolegnas hanya untuk melanjutkan kerja-kerja Baleg DPR periode sebelumnya. Susunan aturan yang masuk Prolegnas juga dapat berubah karena masih diselaraskan, setidaknya sampai 5 Desember mendatang.

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Sukri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan, kerja-kerja Baleg memang belum menyentuh ranah substansi. Hingga kini, Baleg masih sibuk menyatukan persepsi dan menciptakan kekompakan karena hampir setengah anggotanya tergolong baru.

"Jadi, hampir separuhnya baru, kan, di Baleg ini. Supaya satu persepsi yang sama bahwa kerja-kerja Baleg ini harus kompak kami bahas dan menuntut keaktifan juga lebih tepat. Mungkin itu. Jadi, belum masuk ke materi substansinya, baru menyepakati agenda rapat," ujarnya.

Bukan prioritas

Berbeda dengan RUU MD3, RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana justru belum diusulkan masuk Prolegnas jangka panjang. Padahal, publik telah menanti keberadaan UU Perampasan Aset tersebut.

Bob Hasan mengungkapkan, RUU Perampasan Aset belum masuk Prolegnas. "Itu (RUU Perampasan Aset) belum masuk ke kami, belum. Belum masuk," tuturnya.

Padahal, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu dari 47 Prolegnas Prioritas 2024, dari periode DPR sebelumnya, dan Prolegnas 2019-2024. Namun, kali ini aturan tersebut belum tentu masuk, baik Prolegnas jangka panjang maupun tahunan. (WIL/BOW)

penentuan pimpinan lembaga legislatif.

Saat ditanya perihal inti pembahasan, Bob Hasan tak bisa menjelaskan banyak. "Kami belum membaca secara menyeluruh. Tadi kami hanya menyusun agenda, ya, agenda ke depan ini," katanya.

Sebenarnya, wacana revisi UU MD3 berembus sejak Agustus lalu. Perubahan UU MD3 disebut-sebut akan membuat pemilihan pimpinan DPR periode